

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

**Ni Putu Valentiana Shanty Putri  
I Ketut Suardhika Natha**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

## ABSTRAK

Perbedaan karakteristik suatu daerah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidakseragaman ini menyebabkan beberapa daerah mampu tumbuh cepat sementara daerah lainnya tumbuh dengan lambat. Hal ini yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan maupun hasilnya. Desentralisasi fiskal diperlukan untuk menekan tingkat ketimpangan dengan mengelola kembali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang telah diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. Secara parsial, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Ketimpangan distribusi pendapatan*

## ABSTRACT

*Characteristic difference of each region has a strong influence in creating an unquality economic growth. In which causes some regions grow fast, while others are slower. This will then causing an unquality in both to the development and the income among the regions. The fiscal decentralization is needed to decrease the differences by managing back the financial recourses in each region. This research is aimed to find out simultaneously and partially the influence of the local revenue, general allocation fund, the capital expenditure to the income differences among the districts / cities in Bali. The data resources that are used are secondary data and pooled data. The analysis technique of the data that is used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that simultaneously the local revenue, general allocation fund, the capital expenditure have a significant influence to the difference of the income. Partially, the local revenue and general allocation fund have positive and significant influence to the difference of the income whereas the capital expenditure has a negative and significant influence to the difference of the income.*

**Keywords:** *Local Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure, Income distribution Differences*

## PENDAHULUAN

Bali merupakan suatu provinsi di Indonesia yang terdiri atas 8 kabupaten, 1 wilayah kota dan 55 kecamatan dengan perbedaan karakteristik dimasing-masing wilayahnya. Perbedaan karakteristik baik dari letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di masing-masing wilayahnya mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di Bali, sehingga pola pembangunan ekonominya menjadi tidak seragam dan menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada

akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya (Sianturi, 2011). Ketimpangan pembangunan dapat meliputi ketimpangan pendapatan perkapita, dan ketimpangan dalam kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri (Maqin, 2007). Ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. Gini Ratio Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012**

Kabupaten / Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	0.2583	0.2370	0.2575	0.4020	0.3706
Tabanan	0.2437	0.2525	0.2596	0.3648	0.3473
Badung	0.2673	0.2273	0.2864	0.3385	0.3258
Gianyar	0.2788	0.2487	0.2717	0.3279	0.3362
Klungkung	0.2876	0.2871	0.2857	0.3777	0.3473
Bangli	0.2365	0.2263	0.2217	0.2678	0.3053
Karangasem	0.2082	0.2147	0.2325	0.2916	0.2877
Buleleng	0.2485	0.2612	0.2557	0.3434	0.3330
Denpasar	0.2661	0.2652	0.2950	0.3399	0.4248
<b>BALI</b>	<b>0.3104</b>	<b>0.2907</b>	<b>0.3195</b>	<b>0.3820</b>	<b>0.4017</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2013

Tabel 1. menunjukkan angka ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Ratio pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Artinya selama periode tersebut pendapatan per kapita masyarakat semakin timpang. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya kabupaten/kota di Provinsi Bali yang relatif berbeda serta kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk mencegah agar ketimpangan tidak terus melebar diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerahnya yaitu dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Melalui otda dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan melakukan peran alokasi serta mandiri dalam menetapkan prioritas (Sasana, 2009). Pelaksanaan desentralisasi fiskal tercantum dalam UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 yang dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola potensi daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangannya (Samad & Iyan, 2013).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Dwi Sudi (2013), peran pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antar daerahnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali (2013), PAD Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini memberikan pengaruh positif terhadap masing-masing daerah di Provinsi Bali, akan tetapi tingkat ketimpangan di masing-masing daerah masih sangat terlihat jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dana perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Azzumar, 2011).

Dana Alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari dana perimbangan yang juga mempunyai kontribusi paling besar dari total penerimaan daerah. DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Menurut Harianti & Hadi (2007), Proporsi DAU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat (Fattah & Irman, 2012).

Pemberian DAU oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah (Aryanto, 2011). DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan menambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan Belanja modal secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan Belanja modal secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dan objek penelitiannya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Adapun rumus regresi linear berganda sbb:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Gini rasio) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012

X<sub>1</sub> = PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012

X<sub>2</sub> = DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012

X<sub>3</sub> = Belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012

α = Konstan

β<sub>1,2,3</sub> = Koefisien regresi

μ = Standar eror

Selanjutnya data akan diuji dengan uji t dan uji F serta uji asumsi klasik sebagai berikut :

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh daerah melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	21,235	33,952	34,380	41,330	46,470
Tabanan	87,379	93,840	107,836	141,046	183,295
Badung	449,674	850,170	979,241	1,406,298	1,870,187
Gianyar	96,922	112,380	153,617	175,273	261,222
Klungkung	29,028	29,566	31,331	40,735	48,561
Bangli	12,655	16,329	16,252	22,961	40,751
Karangasem	43,005	47,842	62,696	129,556	144,019
Buleleng	52,662	63,487	86,962	109,167	129,003
Denpasar	176,072	215,156	257,899	424,959	511,326
Bali	968,637	1,462,727	1,730,219	2,491,327	3,234,837

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013

Berdasarkan Tabel 2. PAD Provinsi Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang memiliki pendapatan terendah pada tahun 2008 – 2012 yaitu berkisar antara Rp.12.655 sampai Rp.40.751 sedangkan kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2008-2012 yaitu berkisar antara Rp.449.674 sampai Rp.1.870.187.

**Tabel 3. Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	304,078	306,361	308,567	339,501	396,762
Tabanan	416,172	424,287	429,919	463,073	574,346
Badung	265,916	280,987	131,919	157,052	353,067
Gianyar	390,304	405,118	387,493	434,899	532,883
Klungkung	276,182	278,553	285,662	319,611	387,340
Bangli	262,885	276,000	292,695	321,381	396,942
Karangasem	349,814	356,681	374,537	409,812	503,028
Buleleng	504,733	506,292	512,748	568,131	687,697
Denpasar	342,072	360,016	336,125	381,372	512,666
Bali	3,112,161	3,194,300	3,059,667	3,394,837	4,344,735,

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013

Berdasarkan Tabel 3 alokasi DAU di provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kabupaten Badung memperoleh DAU terendah tiap tahunnya yaitu berkisar antara Rp.265,916 sampai Rp.353,067. Sedangkan kabupaten Buleleng memperoleh DAU tertinggi tiap tahunnya yaitu berkisar antara Rp.504,733 sampai Rp.687,697.

**Tabel 4. Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/	Tahun
------------	-------

Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	91,513	100,666	58,163	67,493	134,613
Tabanan	64,749	77,334	107,905	70,442	138,723
Badung	482,467	445,014	176,302	199,704	627,705
Gianyar	98,582	160,249	109,959	124,148	120,627
Klungkung	63,514	82,507	42,555	49,010	81,223
Bangli	85,207	48,305	68,608	114,687	82,340
Karangasem	152,441	141,782	77,507	118,836	171,630
Buleleng	85,197	102,442	47,207	121,895	79,433
Denpasar	66,105	88,378	65,756	88,771	206,143
Bali	1,189,779	1,246,680	753,966	954,991	1,642,442

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui belanja modal di Provinsi Bali tiap tahunnya berfluktuasi. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal paling rendah berada pada kabupaten Klungkung yaitu berkisar Rp. 63,514 tahun 2008 dan Rp. 81,223 tahun 2012. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk belanja modal tertinggi berada pada kabupaten Badung yaitu berkisar Rp. 482,467 tahun 2008 dan Rp. 627,705 tahun 2012.

#### Hasil regresi linear Berganda

$$Y = 0,217 + 0,086X_1 + 0,198X_2 - 0,173X_3 \dots\dots\dots(4.1)$$

$$Se = (0,029) (0,031) (0,069) (0,097)$$

$$t = (7,530) (2,809) (2,876) (-1,777)$$

$$Sig = (0,000) (0,008) (0,006) (0,083)$$

$$R^2 = 0,239 \quad F = 4,290 \quad F_{sig} = 0.010$$

Oleh karena nilai signifikansi  $0,010 < \alpha = 0,05$  dengan  $F_{hitung}(4,29) > F_{tabel}(2,84)$  dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Kondisi ketimpangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan memerlukan kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan tersebut. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Akita (2003) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan antardaerah disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya dan rendahnya kualitas transportasi di beberapa daerahnya.

Menurut penelitian Siddik, dkk (2002) kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Pendapatan yang besar diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang kemudian digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada masing-masing daerah serta mengurangi beberapa ketidakpuasan masyarakat di daerah bersangkutan (Coulombe and Kathleen, 1999). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurhuda dkk (2013) bahwa PAD mempengaruhi terhadap ketimpangan pembangunan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nungki (2011) yang menegaskan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan yang dimana belanja modal dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat menjadi lebih aktif dalam bekerja dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikansi  $0,006/2 = 0,003 < 0,05$  dengan nilai  $|t_{hitung}| (2,87) > t_{tabel} (1,68)$ . Ini berarti bahwa PAD secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Tingkat ketimpangan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dibarengi dengan meningkatnya PAD tiap tahun pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam menekan ketimpangan dianggap belum mampu dikarenakan PAD sendiri lebih dialokasikan untuk belanja rutin seperti : belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain yang bersifat rutin tiap tahun anggaran bukan untuk belanja pembangunan yang bersifat investasi sehingga bermanfaat di masa yang akan datang.

Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai signifikansi  $0,006/2 = 0,003 < 0,05$  dengan nilai  $|t \text{ hitung}| (2,87) > t \text{ tabel} (1,68)$ . Ini berarti bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa meningkatnya DAU akan menyebabkan ketimpangan yang meningkat pula. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriningsih dan Muadi (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi penyebaran DAU tiap daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah semakin tinggi pula kesenjangan antar kabupaten/kota.

Bahl and Wallace (2003) mengungkapkan bahwa transfer antar pemerintah lokal merupakan instrument pemerataan untuk mengurangi ketimpangan . Kondisi yang terjadi pada daerah penelitian yaitu pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak mencerminkan bahwa transfer pemerintah berupa dana alokasi umum (DAU) semakin merata. Terlihat dari jumlah DAU tiap tahunnya yang mengalami peningkatan tetapi ketimpangan yang ada cenderung meningkat pula, ini berarti bahwa DAU belum mampu menekan ketimpangan fiskal horizontal.

Variabel Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi  $0,083/2 = 0,0415 < 0,05$  dengan nilai  $|t \text{ hitung}| (1,77) > t \text{ tabel} (1,68)$ . Ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap pemerintah atau kekayaan serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional yang dapat memberi manfaat lebih dalam satu periode akuntansi (Nuarisa, 2012).

Belanja modal juga memungkinkan suatu daerah untuk membangun sarana dan prasarana, melakukan investasi dan meningkatkan kebutuhan publik. Pembangunan sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya yang kemudian akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita di daerah bersangkutan. Sehingga belanja modal juga menjadi kontribusi besar dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nungki (2011), yang menegaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi

Bali. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam artian PAD meningkat, maka ketimpangan distribusi pendapatan jika meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam artian DAU meningkat, maka ketimpangan distribusi pendapatan juga meningkat.

Belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam artian jika belanja modal meningkat, maka ketimpangan distribusi pendapatan menurun.

Pemerintah seharusnya menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kegiatan atau program-program yang dapat meningkatkan PAD. Upaya peningkatan PAD harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap daya tarik investasi. Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan potensi pajak terutama pajak progresif, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah di masa depan guna mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah serta lebih mengutamakan alokasi PAD untuk belanja pembangunan bukan belanja rutin.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengevaluasi kembali pemberian DAU kepada daerah dengan meninjau alokasi dasar yaitu kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Bagi daerah yang relatif tertinggal, miskin akan sumber daya alam dan memiliki kemampuan keuangan yang rendah maka melalui besarnya DAU yang merupakan bantuan dana dari pusat akan dapat menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah sehingga daerah tetap dapat pula membangun dan berkembang seiring dengan daerah-daerah lain yang berkembang cepat. Proporsi DAU diharapkan lebih dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik daripada dimanfaatkan untuk pengeluaran rutin. Hal ini lah yang dapat mengurangi adanya ketimpangan pendapatan antar daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan belanja modal karena berkaitan dengan fasilitas publik. Perlunya dilakukan pengalokasian belanja modal secara lebih efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk belanja rutin namun lebih ditekankan pada belanja modal.

## REFERENSI

- Akita, Takahiro. 2003. *“Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method.”* The Annal of Regional science No. 37, P. 55-77.
- Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. III No.2.Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

- Azzumar, Mochamad Rizky. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali Dalam Angka Tahun 2013*. Bali.
- Bahl,R. & Wallance S. 2013. Fiscal Decentralisation: The *Provincial-Local Dimension*. *Public Finance in Developing and Transitional Countries*, Martinez-Vazquez and Alm. J. Cheltenham. Edward Elgar.
- Coulombe, Sarge & Kathleen M. Day. 1999. *Economic Growth and Regional Income Disparities in Canada and The Northern United States*. *Journal*. Department of Economics. University of Pttawa. Vol. XXV, N0. 2.
- Dwi Sundi Marliyanti. 2013. Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *Jurnal*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.Denpasar.
- Fattah, Sanusi dan Irman.2012. *Analisis* Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Harianti, David dan Priyo Hari Adi. 2007 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Jurnal* Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Maqin, R. Abdul. 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Jawa Barat. *Jurnal Tri/conoml'ka*. Bisnis Jabar.com.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia.
- Nungki, Sesilia Wijayanti. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2006-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Nurhuda, Rama, M.R. Khairul Muluk, Wima Yudp Prasety. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang,
- Samad, R. Putra dan Iyan, Rita Yani. 2013. Analisis potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Santoso, Singgih. 2004. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik Dengan SPSS Versi 11,5*. Cetakan Kedua Jakarta: PT. Alek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.



Sianturi, Y.Simonsen. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara).*Jurnal*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.

Siddik, M, B Brodjonegoro, R Mahi, R Simanjuntak. 2002. *Dana Alokasi Konsep, hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Penerbitan Buku Kompas

Wardhana, Adhitya, Juanda, Siregar dan Wibowo. 2013. Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.*Jurnal*. Institut Pertanian Bogor.